



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Djaja, Ermansyah, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif)*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Nugraheni, Hermien dkk., 2017, *Mahasiswa Pelopor Gerakan Antikorupsi*, Deepublish Publisher, Sleman.
- Sahetapy, J. E., 2005, *Pisau Analiss Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Siagian, P., 2006, *Filsafat Administrasi Jilid 1*, Penerbit Gramedia, Bandung.



Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta.

Sumardjono, Maria S. W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5454)

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Undang-Undang  
4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance)  
Universitas Gadjah Mada

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Undang-Undang  
4/SK/MWA/2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Gadjah  
Mada

Peraturan Rektor Undang-Undang 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola  
Organisasi Kemahasiswaan

### C. Jurnal, Karya Ilmiah dan Internet dan Sumber Lain

Abdul Ghofur Anshori, 2000, "Mengikis Budaya Korupsi dalam Paradigma  
Masyarakat Madani (*Civil Society*) di Negara Kita", *Jurnal*,  
Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta.

Adhi Bagus Nugroho, 2016, "Analisis Program Anti Korupsi dan Potensi  
Korupsi (Studi pada BMT Bina Ummat Sejahtera)", *Tesis*, Fakultas  
Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Arrahman, 2013, "Analisa Hukum Mengenai Eksistensi Sifat Melawan  
Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarmnya Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006", *Jurnal*, Fakultas  
Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Bambang Waluyo, 2014, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia",  
*Jurnal*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Deviani Pujiastuti Pangulu, 2016, "Analisis Potensi Tindak Pidana Korupsi  
dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat  
Akta Tanah", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta.

Ekodaniarto, 2017, "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan  
Pembangunan Kejaksaan Negeri Kota Magelang dalam Pencegahan  
Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah  
Mada, Yogyakarta.

Halif, 2011, "Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal*,  
Pukat FHUJ, Jember.



- Muhammad David Ricardo, 2018, “Analisis Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terhadap Proyek Pembangunan Infrastruktur”, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nian Riawati, 2010, “Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Propinsi Jawa Timur Tahun 2008)”, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Novri Susan, MA., Ph.D. dan Dr. Tuti Budirahayu, M.Si., 2015, “Kesiapan Aparatur Birokrasi Pemerintahan Desa dalam Menghadapi Potensi Penyimpangan dan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa”, *Penelitian unggulan Perguruan Tinggi*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Afif, 2018, “UGM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang Mandiri”, <http://hktl.ugm.ac.id/v2/ugm-sebagai-perguruan-tinggi-negeri-badan-hukum-yang-mandiri/>, diakses pada 28 Desember 2018.
- Ahmad Fatoni, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, [https://www.academia.edu/8471530/METODE\\_PENELITIAN\\_KUANTITATIF\\_DAN\\_KUALITATIF](https://www.academia.edu/8471530/METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_DAN_KUALITATIF), diakses pada 21 November 2018.
- Dwi Harsono, 2012, “Ilmu Organisasi”, [staffnew.uny.ac.id/upload/132297172/pendidikan/Slide+Org+2010.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297172/pendidikan/Slide+Org+2010.pdf), diakses pada tanggal 15 Desember 2018.
- Indah Mutiara Kami, 2018, “Indeks Persepsi Korupsi 2017, Indonesia Peringkat ke-96”, <https://news.detik.com/berita/3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96>, diakses pada 30 September 2018.
- M. Dani Pratama Huzaini, 2017, “Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b107c37432b/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor>, diakses pada 10 Desember 2018.
- Nazar Nurdin, 2015, “Terbukti Korupsi Dana Bansos, 5 Aktivis Muda HMI dibui 14 Bulan”, <https://regional.kompas.com/read/2015/11/18/22492131/Terbukti.Korupsi.Dana.Bansos.5.Aktivis.Muda.HMI.Dibui.14.Bulan>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.



Parwito, 2015, “Korupsi Bansos, 5 Eks Aktivis HMI dituntut 1,5 dan 2,5 Tahun Penjara”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-bansos-5-eks-aktivis-hmi-dituntut-15-dan-25-tahun-penjara.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016